SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah

Diffada Achmadiansyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
diffa1927@gmail.com

Zaenul Mahmudi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Perkara kewarisan di Indonesia sering kali muncul karena didasari oleh perasaan kurang adilnya pembagian harta waris, kemudian menjadi awal dari perselisihan antar ahli waris, karena kurangnya ilmu pengetahuan di tengah masyarakat tentang pentingnya pembagian waris, menyebabkan masyarakat menganggap remeh dan menunda pembagian waris hingga berlarut-larut yang akhirnya dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem kewarisan yakni terjadinya kewarisan bertingkat (munasakhat). Permasalahan seperti ini pernah terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pendapat Hakim dan Ulama terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian empiris diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah ditemukan dua pendapat yang berbeda di antara Hakim dan Ulama. Hakim berpendapat konsep takharuj dapat digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat ini, sedangkan ulama mengatakan tidak karena harus sesuai dengan ketentuan syara'. Pendapat hakim ini sudah sesuai dengan bunyi pasal 174 KHI dan KUHP pasal 832 yang membolehkan istri untuk menmahjub saudara pewaris serta menurut maqashid syariah yang dimana konsep takahruj jika diterapkan maka akan mengakomodir *maslahat al-khamsah* yakni *hifdz din, hifdz nafs, hifdz nasl* dan *hifdz mal*.

Kata Kunci: Waris; Kewarisan Bertingkat; *Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini maupun untuk mencari kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang menjadi hakikat manusia itu sendiri yakni untuk bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Dengan adanya dua naluri tersebut maka Allah menciptakan diri manusia dengan adanya nafsu. Hal ini sesuai dengan bunyi surat al-Imran ayat 14 yakni "Dijadikan

indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Jika dilihat dari arti ayat ini, manusia memiliki kecintaan pada apa yang diinginkan salah satunya adalah harta yang banyak dari berbagai jenis baik itu emas, perak, binatang ternak dan sawah ladang. Hal tersebut dapat dikatakan juga sebagai nafsu. Nafsu yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan konflik antar sesama manusia dalam rangka memenuhi nafsunya tersebut. Maka dengan itulah muncul adanya aturan bernama hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Aspek kehidupan manusia yang diatur oleh Tuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, tentang hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta. Aturan ini disebut hukum ibadah dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya (*hablun min Allah*). Kedua, tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Aturan ini disebut hukum muamallat dengan tujuan menjaga hubungan antara manusia dengan alamnya (*hablun min al-nas*)¹. Dari kedua perangkat aturan ini, aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang hubungan sesama manusia salah satunya tentang kewarisan.

Persoalan warisan telah terjadi sejak masa pra Islam hingga zaman modern ini. Munculnya kematian antar anggota keluarga pada zaman pra Islam dapat menyebabkan adanya perpecahan dalam sebuah keluarga. Penyebab utama dikarenakan ketika seorang meninggal dunia maka akan timbul persoalan terhadap harta yang ditinggalkan yang akan beralih kepemilikannya ke orang yang ditinggalkan. Peralihan harta ini disebut juga dengan hukum waris².

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan³.

Pemahaman masyarakat Indonesia terkait pembagian harta waris sering kali menyebabkan masyarakat kita menyepelkan pembagian harta waris ketika salah satu sanak keluarganya ada yang meninggal dunia. Pembagian harta waris tidak jarang ditangguhkan oleh para ahli waris setelah sang pewaris meninggal dunia, penangguhan ini menyebabkan masalah dikemudian hari karena semakin lama pembagian harta waris tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan ada ahli waris lain yang meninggal dunia. Jika hal ini terjadi maka hadirilah fenomena yang dinamakan kewarisan bertingkat. Untuk memudahkan perhitungan hak kewarisan ahli waris tersebut dalam fikih mawaris terdapat perhitungan melalui metoda al-

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 3.

² Nur Lailatul Musyafaah, 'Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (June 2017): 57. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004)

munasakhat. Dinamakan munasakhat karena peristiwa kasus kewarisan yang pertama dialihkan kepada peristiwa kasus kewarisan yang kedua, disebabkan terdapat pengalihan harta waris dari seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli waris yang lain.

Peristiwa diatas pernah terjadi di Pengadilan Agama Denpasar, terlihat pada putusan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 15 Maret 2018. Didalam putusan ini, suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang anak. Lalu, pewaris juga meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan pembagian harta waris ini ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta waris tersebut, sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris, maka istri tidak dapat menggantikannya. Dikarenakan kondisinya seperti ini, maka pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris.

Selanjutnya dalam perkara tersebut majelis hakim menetapkan sebagian harta jatuh kepada ahli waris kedua yakni saudara kandung dari pewaris karena adanya kewarisan bertingkat, dan hal ini didasarkan atas kepastian hukum sesuai dengan hukum Islam, namun disisi lain penetapan disinyalir mengabaikan situasi dan latar belakang istri yang harus mengasuh dan membesarkan anak karena perkawinan dengan ahli waris. Penulis menemukan kurangnya rasa keadilan karena majelis hakim terkesan mengesampingkan situasi istri pewaris yang harus menghidupi anaknya dengan sisa harta yang dimilikinya.

Dari fenomena diatas, penulis melihat keputusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kondisi perkara kewarisan bertingkat tersebut tidak dapat mencerminkan keputusan yang mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala kerusakan. Padahal posisi majelis hakim didalam perkara tersebut adalah pihak yang seharusnya dapat memberikan kemaslahatan dari putusan yang ia putuskan. Majelis Hakim diharapkan dapat menerapkan teori Maqasid As-syariah ke dalam putusannya agar dapat mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan yang menurut Al-Syaithibi yaitu terdiri dari 3 bagian yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsanayah. Terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima Pokok itu ialah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Mengenai penyelesaian perkara kewarisan bertingkat ini terdapat beberapa karya ilmiah yang telah diteliti oleh peneliti lain yang mempunyai kesamaan permasalahan yang dibahas namun berbeda pada sudut pandangnya. Yang kemudian akan disebutkan persamaan dan perbedaannya guna menghindari adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu.

Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Ghumam Khumaini Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK)". Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan penetapan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sedangkan bedanya terletak pada penelitian yang ditulis Ghumam Khumaini Rohman menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *maqashid syariah*⁴.

Yang kedua penelitian Muhammad Syahrul Ramdhani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Penyelesaian Kasus Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penejelasan terkait penyelesaian kasus munasakhah dan ahli waris pengganti pada penetapan nomor 648/Pdt.G/2018/PA.JP yang ditinjau dari fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwasanya penyelesaian pada kasus munasakhah ini hakim melakukan ijtihad hukum dalam memutus dan mengadili kasus ahli waris pengganti karena memasukan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu yang didasarkan dengan pasal 185 dan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam⁵. Dalam penelitian yang ditulis oleh Syahrul Ramdhani ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah kedua penelitian yaitu membahas tentang terjadinya kasus kewarisan bertingkat (*Munaskhah*) dalam kajian teori penelitiannya. Sedangkan dari segi perbedaan Syahrul Ramdhani menggunakan perspektif Fiqh dan Kompilasi hukum Islam untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Yang ketiga penelitian dari Uswatun Khasanah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Sistem Waris *Takharuj* Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapat Syaikh Ibnu Abidin dan KHI tentang pembagian harta waris secara *takharuj* serta relevansinya dalam keadilan. Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwasanya penyelesaian pembagian kewarisan secara *takharuj* ini menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yakni mengharuskan adanya keridhoan antara satu dengan yang lain dan sama-sama menjunjung nilai keadilan yang tinggi⁶. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan penelitian ini adalah penggunaan *takharuj* sebagai saran penyelesaian peerkara waris dalam penelitiannya, sedangkan perbedaannya Uswatun Khasanah menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil dari pendapat Syaikh Ibnu Abidin untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Yang keempat penelitian dari Hamdani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, “Kosnep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh. Kesimpulan penelitian tersebut adalah penyelesaian pembagian kewarisan secara *takharuj* ini boleh dilakukan dari awal

⁴ Ghumam Khumaini Rohman, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787>

⁵ Muhammad Syahrul Ramdhani, “Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550>

⁶ Uswatun Khasanah, “Sistem Waris *Takharuj* Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf>

sebelum pembagian warisan dilakukan, hanya ahli waris yang keluar harus mengerti beberapa bagian yang menjadi haknya dan kemudian dapat diambil yang kemudian memberikan kepada ahli waris lainnya sebagai sedekah⁷. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Hamdani dengan penelitian ini adalah penggunaan takharuj sebagai saran penyelesaian perkara waris dalam penelitiannya, sedangkan perbedaannya Hamdani menggunakan membahas penelitian konsep *takharuj* ini dengan pembagian warisan menurut adat di Aceh untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Yang kelima penelitian dari Kadek Karina Putri. Universitas Warmadewa, “Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk untuk mengetahui bentuk keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pembagian waris bentuk bertingkat (Munasakhat). Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat⁸ Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Kadek Karina Putri dengan penelitian ini adalah pembahasan penyelesaian kewarisan bertingkat munaskhat sebagai salah satu kasus yang terjadi di masyarakat, sedangkan perbedaannya Kadek Karina Putri menggunakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Yang keenam penelitian dari Muhammad Agung Ilham Affarudin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk untuk mendeskripsikan tentang sistem pembagian waris secara damai dalam surat perjanjian dengan mengimplementasikan KHI Pasal 183. Kesimpulan penelitian tersebut adalah Pertama, dasar hukum yang membolehkan pembagian waris dilakukan secara damai dengan jalan musyawarah di Indonesia adalah Pasal 183 KHI demikian sudah sesuai, dengan konsep masalah mursalah⁹. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Agung Ilham Affarudin dengan penelitian ini adalah penggunaan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang perdamaian yang dalam hal ini adalah takharuj sebagai saran penyelesaian perkara waris dalam penelitiannya, sedangkan

⁷ Hamdani, “Kosnep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf>

⁸ Kadek Karina Putri, “Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2 No Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1616.114-118>

⁹ Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan, “Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No, 2 (2021) <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>

perbedaannya Muhammad Agung Ilham Affarudin menggunakan persepektif Masalah mursal dalam membahas penelitian tersebut.

Yang ketujuh penelitian dari Wahidah, Institut Agama Islam Negeri Antasari, “Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan”. Dalam Penelitian tersebut bertujuan untuk ini dimaksudkan untuk mengetahui deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan munasakhah pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, sekaligus tinjauan hukum Islam (Faraidh) terhadapnya. Kesimpulan penelitian tersebut adalah tidak semua kasus munasakhah di dalamnya terdapat kewarisan berganda dan bisa saja menerapkan takharuj¹⁰. Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Wahidah dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) untuk mengetahui penyelesaian kewarisan kasus kewarisan yang diteliti mengalami kasus munasakhah atau kewarisan bertingkat secara langsung. Sedangkan perbedaannya Wahidah menggunakan tinjauan hukum Islam (faraidh) terhadap kasus kewarisan turun temurun yang tertunda untuk melihat hasil dari penelitian tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimanakah Apa pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali?. Kedua, Bagaimana penyelesaian perkara kewarisan bertingkat pada putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dps dilihat dari perspektif *maqashid syariah*? Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk Untuk mengkaji pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar, sehubungan dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dan mengkaji penyelesaian perkara kewarisan bertingkat pada putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dps dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, yakni sebuah penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan atau masyarakat¹¹. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari proses wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti langsung ke lapangan. Dalam hal ini yang dimaksud informan adalah dua orang hakim dari Pengadilan Agama Denpasar dan dua orang ulama dari MUI Kota Denpasar. Pengumpulan data atau informasi langsung dengan mendatangi ke tempat atau lokasi penelitian untuk menggali data yang terkait bagaiman pandangan hakim dan ulama dalam memutuskan perkara kewarisan bertingkat studi kasus yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali. Penelitian dilakukan di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan lokasi dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Yang beralamat di Jl. Cokroaminoto No.42, Ubung, Kec. Denpasar, Kota Denpasar, Bali 66131, Indonesia sebagai Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara kewarisan bertingkat

¹⁰ Wahidah, “Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten Di Kalimantan Selatan” Jurnal Tashwir Vol. 3 No. 8, (2015) <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/604/pdf/22>

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

yang terjadi di lingkungan Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali.

Pandangan Hakim Dan Ulama Di Kota Denpasar Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Yang Terjadi Di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali.

Secara teoritis hukum kewarisan Islam dalam beberapa *literature* hukum Islam ditemukan beragam penyebutan terkait hukum kewarisan Islam yang diantaranya seperti: *Faraidh*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm al-Waris*. Lafadz *faraidh* sendiri adalah jamak dari lafadz *fariidhah* yang berarti kewajiban atau dapat diartikan sama dengan *muqaddarah* yang berarti sesuatu yang telah ditetapkan setiap bagiannya secara jelas¹². Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *faraidh* karena ketentuan dalam al-Qur'an lebih banyak dijelaskan tentang bagian yang telah ditentukan dari pada bagian yang tidak ditentukan ataupun dapat diartikan bahwa penyebutan *faraidh* ini dilandasi pada bagian yang diterima oleh ahli waris¹³. Kata *faraidh* dalam *literature* hukum positif di Indonesia menjadi kata waris yang dimana hal ini memiliki arti hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris¹⁴. Adapun sumber atau dasar hukum kewarisan Islam yang terdiri dari nash yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist yang mengatur waris Islam diantaranya Surat an-Nisa ayat 7, ayat 11 hingga 12 serta ayat 176¹⁵.

Persoalan kewarisan telah menjadi sebuah problematika yang terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang. Pada kenyataannya bahwa hingga hari ini perkara penetapan ahli waris atau pembagian harta warisan menjadi perkara terbanyak kedua setelah kasus perceraian. Terutama di Indonesia ini tidak lain terjadi karena kurang adil dalam pembagian harta warisan yang akhirnya menimbulkan persoalan baru diantara ahli waris, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan tentang pentingnya pembagian warisan yang menyebabkan masyarakat Indonesia menganggap remeh dan menunda pembagian itu hingga berlarut-larut yang akhirnya menimbulkan persoalan baru dalam sistem kewarisan yakni akan terjadinya kewarisan bertingkat (*munasakhat*).

Secara teori bahwa kewarisan bertingkat (*munasakhat*) dalam pengertian bahasa arab yaitu al-Munasakhat yang berarti memindahkan dan menghilangkan, contohnya dalam kalimat nasakhtu al-kitaba bermakna kita menukil (memindahkan) kepada lembaran lain¹⁶. Menurut As-Sayyid asy-Syarif, menyatakan bahwa munaskhah ini diartikan sebagai "Pemindahan sebagian harta waris kepada sebagian ahli waris yang berhak menerima setelah adanya kematian dari pewaris, karena kematiannya sebelum

¹² Amni Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020), 60.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

¹⁴ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal 'Aainul Haq*, Vol 1 No 1 (2021): 63 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236/190>

¹⁵ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 08, no. 1, (2020) 72.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/771/529>

¹⁶ Fatahullah, "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/Pa.Sel", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VI, No. 1, (2018), 117

https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/526/pdf_67

pembagian harta waris dibagikan”¹⁷. Sedangkan Ibnu Umar Al-Baqry mentar’rifkan bahwa munasakhah ialah kematian seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia¹⁸. Maka *munasakhah* jika dijabarkan memiliki arti adanya sebuah proses pindahnya sebagian harta warisan dari orang atau pewaris yang meninggal dunia setelah kasus kematian pertama sampai berikutnya atau bertingkat, dan kemudian harta waris itu belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan perhitungan bagian yang didapatkan secara sekaligus kepada ahli waris berikutnya.

Munasakhah ini memiliki beberapa unsur yang diantaranya: (1) Harta warisan dari kematian pertama belum dibagikan menurut ketentuan pembagian warisan, (2) Satu atau lebih ahli waris meninggal setelah pewaris, (3) Terjadinya pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli waris lain yang sebelumnya tidak termasuk sebagai ahli waris dari pewaris pertama, (4) Pemindahan harta warisan bukan melalui jalan hibah, hadiah ataupun pembelian, melainkan melalui jalan mempusakai¹⁹.

Berdasarkan permasalahan tentang munculnya kewarisan bertingkat atau munasakhah yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi di dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps, suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang anak. Kemudian meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan pembagian harta ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris maka istri tidak dapat menggantikannya. Dengan ini saat pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris. Dalam penetapan perkara Pengadilan Agama Denpasar nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps, hakim memutuskan permohonan penetapan hak waris saat itu dianggap tidak dapat diterima karena pemohon tidak dapat mendatangkan ahli waris dari ahli waris pertama sepeninggal suaminya dalam hal ini adalah ibu sang suami.

Melihat realita bahwasanya dalam suatu kasus, terdapat banyak kemungkinan yang secara kasat mata tidak terlihat dalam sebuah penetapan. Jika hanya membaca bagaimana penetapan itu berbunyi, terlihat bahwasanya hakim sudah tepat memutuskan perkara tersebut. Namun, hakim tidak melihat bagaimana dampak yang terjadi dibelakang layar dari penetapan tersebut.

Artikel ini menggunakan penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps sebagai contoh kasus, yang kemudian mencari narasumber dari perkara tersebut yang dapat menjelaskan terkait bagaimana penyelesaian kasus kewarisan bertingkat sesuai dengan persoalan yang terjadi dalam penetapan tersebut. Maka dari itu dalam artikel ini hakim dan ulama memberikan pandangannya masing-

¹⁷ Rukiah, “Sistem Munasakhah Dalam Kewarisan”, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2014):140 <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.206>

¹⁸ Muhammad Sudirman, “Munasakhah Dalam Sistem Kewarisan Islam”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11. No. 2, (2016): 132 <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2808>

¹⁹ Nurul Muthahharah dan Supardin, “Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. 1 (2020): 123 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16717>

masing terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Denpasar.

Hakim memiliki pandangan bahwasanya dalam kasus-kasus tertentu yang kondisinya tidak umum, dalam hal ini kewarisan bertingkat dan hartanya sedikit yang sesuai dengan penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, menggunakan penyelesaian selain cara-cara yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Kompilasi Hukum Islam masih dapat dilakukan, antara lain adalah menggunakan proses perdamaian atau menerapkan *takharuj*²⁰. Karena konsep perdamaian ataupun *takharuj* ini hukumnya boleh dan dapat dilakukan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara kewarisan bertingkat seperti halnya perkara yang pernah terjadi di salah satu penetapan Pengadilan Agama Denpasar²¹. Mengingat jika perdamaian atau *takharuj* dapat diimplementasikan kepada perkara kewarisan bertingkat, maka akan menghasilkan kepenetapan yang diyakini dapat memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak karena hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang acap kali dilewatkan dalam memutuskan suatu perkara.

Berbeda dari Hakim, Ulama di Kota Denpasar berpendapat bahwasanya sekalipun penggunaan perdamaian ataupun *takharuj* itu boleh atau mubah, maka tetap saja yang harus digunakan dalam memutuskan suatu perkara hak waris haruslah berdasarkan system kewarisan Islam seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam Kompilasi Hukum Islam²². Karena selama masih dapat digunakan pembagian secara yang ada dalam al-Qur'an dan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka itu akan didahulukan²³.

Para Ulama di Kota Denpasar sepakat bahwasanya menggunakan pembagian harta waris sesuai Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam adalah lebih utama daripada menggunakan konsep perdamaian ataupun *takharuj*. Maka apa yang diputus hakim dan apa yang terjadi dengan harta sengketa waris tersebut yang pada akhirnya hanya dijual kepada pihak lain adalah bagi para Ulama adalah suatu langkah yang tepat. Menurut ulama, harta sengketa tersebut, memang sudah seharusnya dijual, untuk kemudian hasil dari penjualannya tersebut dibagikan sesuai ketentuan kepada ahli waris. Pandangan yang disampaikan oleh narasumber yakni dua orang hakim dan dua ulama yang berada di Kota Denpasar ini memberikan tanggapan yang berbeda terkait penyelesaian perkara seperti ini dengan menggunakan perdamaian atau *takharuj*.

Menurut teori yang ada bahwa pengertian *takharuj* sendiri berasal dari Bahasa Arab, Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish, beliau berpendapat berasal dari kata *Takharaja*. Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menjelaskan bahwa praktik *takharuj* dalam kewarisan Islam berasaskan kepada akad *mu'awadah* dengan syarat mereka para ahli waris saling ridha²⁴. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya disebutkan "Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluar/mundurnya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan, maupun dari

²⁰ Hirmawan Susilo, wawancara, (Denpasar 7 Desember 2021)

²¹ H. Aris Habiduddin Syah, wawancara, (Bangli 10 Februari 2022)

²² Mohammad Anwar Hamid, wawancara, (Badung, 11 Februari 2022)

²³ Fauzi Hamid Abbas, wawancara, (Badung, 14 Februari 2022)

²⁴ Hamdani, "Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan", *Al-Hisab : Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 35 <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/65/5>

yang lainnya”²⁵. Maka dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh bahwa *takharuj* dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan diantara ahli waris untuk melepaskan atau mengundurkan beberapa ahli waris dan meninggalkan bagian warisannya dalam harta warisan yang sebagai gantinya diberikan imbalan tertentu dari dalam harta warisan tersebut atau dari luar harta warisan²⁶. Akad *takharuj* ini dihukumi mubah atau boleh ketika kedua ahli waris ini saling ridha atas dasar kerelaan ataupun keikhlasan keduanya.

Dasar adanya *takharuj* ini dalam penerapannya di sistem kewarisan Islam tidak dijumpai dasar hukumnya dalam Al-Qur’an. Maka kajian *takharuj* ini memasuki ranah persoalan ijtihadiyah yang dimana ditemukan dasar hukum *takharuj* didasarkan pada hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. *Atsar* tersebut berbunyi “Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin „Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”²⁷

Oleh karena itu berdasarkan teori yang ada tentang apa yang menjadi unsur terjadinya munaskhat dan bagaimana penyelesaian itu menggunakan *takharuj* maka dapat dikatakan bahwa kasus atau persoalan seperti dalam penetapan Nomor 22/Pdt.P/ 2018/ PA Dps yang dimana terjadinya kewarisan bertingkat dalam perkaranya dikarenakan menunda pembagian harta warisan terhadap ahli waris, pandangan hakim telah sesuai dengan teori yang ada yaitu menyampaikan pandangan terkait penyelesaian kewarisan bertingkat ini dapat diselesaikan dengan *takharuj*. Namun, ulama di Kota Denpasar masih berpendapat bahwa pembagian seperti itu tetap harus sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam yang tertulis dalam al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis Perbedaan Pendapat Hakim dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Dalam Perspektif Maqashid syariah.

Dalam hasil wawancara dengan hakim dan ulama. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat ini. Pendapat Hakim yang mengatakan penggunaan konsep *takharuj* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat hadir sesuai dengan pemahaman bahwasanya pembagian waris berdasarkan kebutuhan ahli waris, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonominya, bukanlah konsep yang keluar dari hukum Islam, justru konsep ini adalah konsep yang penerapannya sesuai dengan ruh pemberlakuan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Sebagaimana bunyi kaidah maqashidi yakni Ketetapan hukum-hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi hamba, baik untuk konteks duniawi, maupun ukhrawi.

Penerapan konsep *takharuj* yang disampaikan para hakim ini telah sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari :

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 642.

²⁶ Wahidah, “Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Tashwir* Vol. 3 No. 8, (2017): 390 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/604/pdf/22>

²⁷ Siah Khosyi’ah, “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan”, *Jurnal Adliya*, Vol. 10, No. 1, (2017): 4 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/5143/pdf>

ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kedudukan seorang janda dapat menghalangi atau menmahjub kedudukan saudara laki-laki dalam kewarisan yang dimana maka penerapan konsep *takharuj* dalam persoalan kewarisan bertingkat ini menjadi lebih adil dan utama untuk keadilan bagi janda dan anak-anaknya.

Kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan pada pasal 832 berbunyi orang-orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu pada golongan I : keluarga yang berada pada garis lurus kebawah diantaranya suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hiup lebih lama. Golongan II diantaranya keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta leluhur. Golongan IV yaitu anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya higgs derajat keenam. Jika dikaitkan dengan persoalan kewarisan bertingkat seperti yang penulis sampaikan penggunaan konsep takharuj menurut hakim ini sudah tepat karena dalam pasal 832 kitab undang-undang hukum perdata ini bahwa istri atau janda dalam hal ini lebih utama mendapatkan harta warisan dari pada golongan-golongan yang lainnya.

Begitupun dalam Maqashid syariah, secara teoritis bahwa maqashid syariah memiliki pengertian maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa maqashid al- Syariah erat kaitannya dengan hikmah dan illat²⁸. Menurut Syekh Muhammad Thahir ibn 'Asyur memberikan dua macam definisi *maqashid syariah* yakni Hal-hal yang dikehendaki syari' untuk merealisasikan setiap tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus²⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam *syari'ah* adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga akhirat³⁰.

Dalam maqashid syariah ada yang disebut dengan Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu ; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah³¹.

Dalam artikel ini penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang menggunakan takharuj ini akan dapat memenuhi konsep Maqashid Syariah yaitu, didalam konsep hifdz al-Din (memelihara agama) dalam hukum waris Islam dengan berdasarkan ketentuan Allah dalam masalah pembagian kewarisan, ini merupakan suatu tanda kepatuhan dan ketaatan seorang hamba terhadap hukum hukum yang ditetapkan oleh

²⁸ Ali mutakin. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, No. 3, (2017) 549 <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>

²⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), 19.

³⁰ Moh Nasuka, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem,Praktik,dan Produk Perbankan Syariah", *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. XV, No. 1,(2017) 2 <https://doi.org/10.28988/diktum.v15i1.421>

³¹ Zakiyatul Fuadi, "Menyoal rekonstruksi maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol.18(1) (2018) . 1-33. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>

Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 13 yang berbunyi: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar” . Sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap mengaplikasikan Hukum Allah dalam penyelesaian perkara kewarisan dalam hal ini kewarisan bertingkat maka penyelesaiannya juga harus dibarengi dengan penyesuaian kondisi perkara yang ada, dan mengaplikasikan penyelesaian secara perdamaian atau takharuj bisa menjadi salah satunya.

Lalu kemudian konsep Hifdz an-Nasl (memelihara keturunan) yang memiliki arti memelihara keturunan. Islam memberikan cukup perhatian yang besar terhadap melindungi keluarga dari cacat lemah dan mengayomi untuk mewujudkan ketenangan dalam menjamin kehidupan keluarga yang rukun melalui memuliakan nasab tersebut. Karena pada dasarnya nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga yang menopang seseorang dalam berakidah, berakhlak dan syari’at³². Dalam masalah kewarisan Islam tentunya dihimbau untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga, dengan cara lebih mengutamakan hubungan keluarga dalam pembagian warisan. Persoalan yang terjadi penyelesaian kewarisan bertingkat ini jika hakim memberikan pandangan bahwa penyelesaian menggunakan takharuj akan lebih tepat karena hifz an-Nasl dalam hal ini dapat terciptanya kerukunan antar keturunan yakni agar ahli waris dapat membagikan harta warisan tersebut secara sesuai dengan bagian yang proporsional dan adil sesuai kondisi namun tidak lepas dari yang sudah ditetapkan Allah swt sehingga tidak terjadi perselisihan dan keributan dalam hubungan keluarga.

Kemudian konsep maqashid syariah yang lain adalah Hifdz al-Mal yang memiliki arti memelihara harta. Manusia di sarankan untuk memanfaatkan harta dengan mengusahakan dan mendapatkan harta dengan jalan yang lurus dan sesuai dengan syari’at. Hal ini diisyaratkan agar tidak terjadi konflik atau perselisihan antar sesama manusia³³. Dengan konsep ini terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, dalam hal ini penggunaan cara-cara penyelesaian secara perdamaian atau takharuj diharapkan dapat meminimalisir penguasaan harta warisan yang menguntungkan hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat di bagikan dengan melihat faktor kegunaan dan kemanfaatan atas harta waris tersebut, sehingga tercapainya keadilan dan kemaslahatan kepada pada ahli waris.

Yang terakhir adalah konsep maqashid syariah yakni *hifz al-Nafs* atau dalam arti yakni memelihara jiwa hal ini melekat dengan diri seorang dalam menjaga eksistensi kehormatan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan persoalan waris aspek perlindungan ini adalah sebagai upaya penyelesaian kasus kewarisan ahli waris dan pewaris dalam hal penjagaan dirinya terhadap harta. Dengan penyelesaian perkara kewarisan dengan menggunakan takharuj maka terselenggaranya pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, diharapkan tidak ada jiwa yang terganggu terutama yakni psikis dari salah satu ahli waris yang

³² M. Luthfi Khakim. “Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah. *Nizham* .Vol.8(1) (2020). 37. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>

³³ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam kemaslahatan masyarakat”. *Jurnal at-Tadbir : Medis Hukum dan Pendidikan* . Vol.30(1) (2020): 21 <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

diakrenakan kekecewaan terhadap hasil dari pembagian waris yang dianggap kurang adil kepada pada ahli waris.

Menjadikan maqashid syariah sebagai dasar ijtihad dalam permasalahan waris dirasa sangatlah tepat, sebab penerapan hukum berdasarkan maqashid syariah mengebolarasikan tatanan teks dan konteks, sehingga penerapan hukumnya, sangat dirasakan kemanfaatannya. Kemudahan syari'at Islam dalam pandangan Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili adalah anugerah yang diberikan Allah pada orang Islam . Perintah dan keadilan adalah tujuan yang mendasar bagi syari'ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum waris sebagai salah satu syari'at Islam, juga harus sesuai dengan tujuan pemberlakuan hukum (maqashid syariah), yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Konteks dalam hal ini adalah keadilan dan kesejahteraan janda dan anak-anaknya.

Berbeda dengan hakim, Ulama memiliki pendapat bahwasanya penggunaan konsep perdamaian atau takharuj tidak dapat digunakan karena masih ada cara penyelesaian lain yaitu melalui ketentuan dalam Al Quran yaitu dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an terkait tentang pembagian warisan yang diantaranya yakni surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Selain dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan dalam beberapa pasalnya yakni dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua." Kemudian dilanjutkan dalam pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam ayat 1 yakni "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian." Dalam ayat ke-2 berbunyi: "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah ". Setelah itu dalam pasal 180 yang berbunyi: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian" .

Kedua hal tersebut tentunya tidaklah salah, namun jika menggunakan cara penyelesaian yang dimaksud Ulama, maka dikhawatirkan akan hilangnya keadilan dan kesejahteraan terhadap ahli waris.

Jika dilihat berkembangnya berbagai pemikiran mengenai waris tersebut, disebabkan munculnya beragam masalah, dan kondisi yang berbeda dengan situasi Islam di masa Nabi. Para pemikir Islam menganggap bahwa hukum Islam yang sudah ada, tidak cocok jika diterapkan di masa modern, ketika tatanan zaman telah berubah. Jika dipaksakan, menurut mereka, hukum Islam akan kehilangan wibawa, dan akan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, karena dianggap tidak mencerminkan sikap adil³⁴.

Hal inilah yang menjadi dasar dalam artikel ini untuk menekankan dapat diterapkannya konsep perdamaian ataupun takharuj pada kasus kewarisan bertingkat, terlebih lagi dalam kasus yang jadikan contoh yaitu perkara Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Karena peneliti melihat kompleksnya kasus ini dimulai dari ahli waris yang

³⁴ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid syariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 8 no. 1 (2016): 57
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

bertingkat lalu disertai dengan sedikitnya harta yang dibagi dan pada prinsipnya, kasus dengan tingkat kerumitan seperti ini, agar siapapun pemohonnya, bagaimanapun keadanya, berapapun jumlah harta warisnya, keadilan dan kesejahteraan tetap dapat mereka rasakan, dan mempertimbangkan penyelesaian secara perdamaian atau menerapkan takharuj bisa dijadikan suatu pilihan.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terhadap pandangan hakim dan ulama terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Bali maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim dan ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam penetapan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Hakim berpendapat penyelesaian perkara itu dapat menggunakan konsep takharuj hal ini sesuai dengan bunyi pasal 174 KHI dan Kitab undang-undang hukum perdata pasal 832 yang dimana bahwa seorang istri dalam hal ini dapat menmahjub saudara dari si pewaris atau suami yang meninggal. Kemudian pendapat ini juga lebih tepat dan adil sesuai dengan maqashid syariah yang dimana jika takharuj ini diterapkan maka hifdz al-Din hifdz al-Mal, hifdz an-Nasl, hifdz al-nafs dalam masalah al-Khamsah dapat terlaksana dengan baik. Berbeda dengan pendapat hakim, ulama mengatakan bahwa penyelesaian ini lebih utama menggunakan ketentuan sesuai syara' yaitu al-Quran dan dalam KHI karena dengan mengikuti syara' maka semua pembagian sudah sangat adil bagi para ahli waris. Maka dari kedua perbedaan pendapat hakim dan ulama ini, dalam artikel ini lebih ditekankan pada pendapat hakim yang menggunakan perdamaian atau takharuj.

Daftar Pustaka:

- Aziz, Abdul "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid syariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 8 no. 1 (2016): 48-63 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Fatahullah, "Antara Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Nomor: 0311/Pdt.G/2009/Pa.Sel", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VI, No. 1, (2018), 110-125 https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/526/pdf_67
- Fuadi, Zakiyatul "Menyoal rekonstruksi maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*.Vol.18(1) (2018) . 1-33. <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan", *Al-Hisab : Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 32-43 <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/65/5>
- Hamdani. "Kosnep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)" Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf>
- Ilham Affarudin, Muhammad Agung dan Darmawan. "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif

- Maslahah Mursalah)". Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No, 2 (2021): 385-417
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>
- Johan Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mendar Maju, 2008).
- Khakim, M. Luthfi. "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah". Nizham .Vol.8(1) (2020). 32-41.
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Khasanah, Uswatun. "Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya Dengan Keadilan" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
<http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf>
- Khosyi'ah, Siah "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan", Jurnal Adliya, Vol. 10, No. 1, (2017): 1-18
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/5143/pdf>
- Musyafaah, Nur Lailatul. 'Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam', Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20, no. 1 (2017): 56-76
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>
- Mutakin, Ali "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIX, No. 3, (2017) 113-136
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>
- Muthahharah, Nurul dan Supardin, "Sistem Munasakhah Dan Plaatsvervulling", QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No. 1 (2020): 119-130
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16717>
- Nasuka, Moh"Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem,Praktik,dan Produk Perbankan Syariah" , Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. XV, No. 1,(2017) 1-126
<https://doi.org/10.28988/diktum.v15i1.421>
- Nur Baits, Amni. Pengantar Ilmu Waris. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020.
- Nur Assyafira, Gisca "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 08, no 1, (2020)
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/771/529>
- Noviarni, Dewi "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", Jurnal 'Aainul Haq , Vol 1 No 1 (2021): 61-75
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236/190>
- Putri, K, K., Suwitra, I, M., Sukadana, I, K. Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam. Jurnal Analogi Hukum. 2(1) (2020).. 114-118. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1616.114-118>
- Ramdhani, Muhammad Syahrul. "Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550>

- Rohman, Ghumam Khumaini “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Penetapan Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787>
- Rukiah, “Sistem Munasakhah Dalam Kewarisan”, *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2017):138-144 <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.206>
- Sarwat, Ahmad. Maqashid syariah. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Sudirman, Muhammad “Munasakhah Dalam Sistem Kewarisan Islam”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 11. No. 2, (2017): 129-137 <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2808>
- Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam kemaslahatan masyarakat”. *Jurnal at-Tadbir : Medis Hukum dan Pendidikan* Vol. 30 (1) (2020): 1-16 <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004
- Wahidah, ”Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Tashwir* Vol. 3 No. 8, (2017): 375-395 https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/604/pdf_22